

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku- Buku.

Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta : Sinar Grafika.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta : Djambatan.

Bushar Muhammad, 1988, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradaya Paramitha.

_____, 2002, *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta : PT Pradaya Paramitha.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.

Dyara Radhite Oriza Fea, *Sertifikat Kepemilikan Atas Tanah dan Perizinannya*, Yogyakarta: PT Suka Buku.

H.M Arba, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

M. Yahya Harahap, 1991, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : PT Gramedia.

_____, 2013, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.

Phillpe Nonet dan Philip Selznick, 1978, *Law & Society in Transition: Toward Responsive Law*, terjemahan Rafael Edy Bosco, cetakan pertama 2003, Perkumpulan Huma, Jakarta.

Q.S Al-Hajj, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

Ridwan, 2010, *Hak milik*, Purwokerto: Stain Press.

S.Chandra, 2005, *Sertifikat Kepemilikan Atas Tanah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

_____, 2006, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah*, Medan : Pustaka Bangsa Press.

Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI), Jakarta.

Supriadi, *Hukum Agraria*, Jakarta : Sinar Grafika.

B. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).

Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Rechtsreglement Voor dee Buitengeweste (RBG).

Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering (Rv atau BRv).

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa Pertanahan.

Putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 7/Pdt.G/2012/PN.PSB tentang Perkara Sengketa Tanah antara PT Arpec dengan Rang Tuo Damri Cs.

Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 144/Pdt/2013/PT.PDG tentang Putusan Banding Perkara Sengketa Tanah antara PT Arpec dengan Rang Tuo Damri Cs.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1485/K/Pdt /2014 tentang Putusan Kasasi Perkara Sengketa Tanah antara PT Arpec dengan Rang Tuo Damri Cs.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.67/K/Sip/1975 tentang Petitum tidak sesuai dengan Posita.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565/K/Sip/1973 tentang Obyek Gugatan Kabur.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1646/K/Sip/1974 tentang Pihak yang Mengajukan Gugatan Harta Pusaka Tinggi di Minangkabau.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1598/K/Sip/1975 tentang Mamak Kepala Waris dalam Hukum Adat Minangkabau.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1343/K/Sip/1975 tentang *Niet Ovantkelijk* (NO).

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1720/K/Sip/1975 tentang Gugatan yang di Ajukan Selain Mamak Kepala Waris.

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 194/K/Sip/1975 tentang Pengadilan Tinggi harus memeriksa/mengadili perkara secara keseluruhan.

